

Judul : UU PDP Disahkan Pekan Depan
Tanggal : Senin, 19 September 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

UU PDP Disahkan Pekan Depan

Kemendagri akan meningkatkan keamanan siber berdasarkan standar internasional ISO 27001 tentang manajemen keamanan informasi.

SRI UTAMI
ami@mediaindonesia.com

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) hingga diajukan ke tingkat dua berjalan mulus. Semua pihak dari pemerintah dan DPR sudah menandatangani dan sepakat RUU PDP disahkan untuk diundangkan dalam waktu dekat.

"Harusnya iya (disahkan pekan depan) semua sudah menandatangani, Kemenkum dan HAM juga sudah. Semua pandangan mini fraksi dan umum dari fraksi juga sudah semua (setuju)," ujar anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan ketika dihubungi kemarin.

Farhan menerangkan, saat ini tidak ada kendala berarti apalagi kemungkinan perubahan. Ditargetkan RUU PDP disahkan pada 26-29 September atau pekan depan.

"Harusnya tidak ada (perubahan) semuanya mulus. Hanya tinggal masalah teknis antara pimpinan fraksi menentukan kapan digelar rapat paripurnanya," tukasnya.

Sebelumnya, pembahasan RUU PDP sempat tertunda karena ada perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait lembaga pengawas yang bertugas mengawasi praktik perlindungan data pribadi di Indonesia. DPR menginginkan ada lembaga independen khusus untuk menangani masalah perlindungan data pribadi sehingga kerjanya bisa bersifat netral.

Sementara itu, pemerintah menginginkan lembaga tersebut berada langsung di bawah komando Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Dengan begitu, kinerja penanganan kasus pelanggaran perlindungan data pribadi dapat lebih efisien.

Namun, perbedaan masalah itu sudah menemukan titik terang dan telah ada solusi sehingga nantinya lembaga pengawas tetap bisa

bekerja memastikan praktik perlindungan data di Tanah Air berjalan baik.

Perkuat keamanan siber

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan pihaknya akan memperkuat keamanan siber selagi menunggu pengesahan UU PDP.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menerangkan pihaknya juga akan meningkatkan keamanan siber berdasarkan standar internasional ISO 27001 tentang manajemen keamanan informasi.

"Intinya kami memperkuat keamanan data dan tata kelolanya, salah satunya dengan menerapkan ISO 27001," papar Zudan ketika dihubungi kemarin.

Zudan menyebut Kemendagri juga akan meningkatkan *awareness* kepada seluruh instansi Dukcapil di seluruh Indonesia.

"Pun lembaga pengguna terkait dengan perlindungan data dan kewajiban menjaga kerahasiaan data," tegasnya.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko menegaskan pihaknya tidak menemukan adanya indikasi kebocoran data pelanggan di seluruh unit usaha Telkom.

Keseluruhan data pelanggan Telkom telah disimpan dalam sistem yang memiliki keamanan ketat.

"Setelah melalui penelusuran dan investigasi menyeluruh, kami meyakini dan memastikan bahwa tidak ada kebocoran data pelanggan," ungkapnya.

Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto menegaskan hal yang sama.

"BRI tidak ada mengalami kebocoran data. Keamanan data pribadi nasabah merupakan aspek yang sangat penting bagi BRI karena hal tersebut merupakan sebuah amanah yang dipercayakan oleh nasabah BRI," tegasnya. (Ykb/Des/X-10)

"Harusnya tidak ada (perubahan) semuanya mulus. Hanya tinggal masalah teknis antara pimpinan fraksi menentukan kapan digelar rapat paripurnanya."

Muhammad Farhan
Anggota Komisi I DPR